

## PENGIRIMAN PASUKAN GARUDA SEBAGAI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM RANGKA PENINGKATAN ALUTSISTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

### DEPLOYMENT OF GARUDA FORCES AS INDONESIA'S DEFENSE DIPLOMACY IN ORDER TO INCREASE INDONESIAN NATIONAL ARMY'S MAJOR EQUIPMENT SYSTEM

Nugraha Gumilar<sup>1</sup>, Tri Legionosuko<sup>2</sup>, Bintang Widagdo<sup>3</sup>

Prodi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan  
(dagdobintang@gmail.com)

**Abstrak** – Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia didalam Pengiriman Pasukan Garuda Dalam rangka peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia. Indonesia merupakan salah satu pengirim Pasukan Perdamaian PBB, merupakan 10 besar dalam pengiriman personil dan kontribusi pasukan. Kebutuhan setiap negara untuk meningkatkan alutsista adalah suatu yang wajar guna memperkuat pertahanan dalam negerinya. Menurut Permenlu No 1 Tahun 2017 tentang Visi dan Misi Indonesia dalam Roadmap 4000 *peacekeepers* pada 2019 tentang pengiriman Pasukan Garuda sebagai alat proyeksi Alutsista Indonesia dan Dunia. Indonesia juga memiliki beberapa alutsista berupa peralatan tempur utama (*major equipment*) yang dikagumi negara lain, seperti Senapan Laras Panjang SS1 dan Kendaraan Taktis Panser Anoa. Dengan demikian diperlukan penelitian tentang tantangan dan peluang bagaimana pengiriman pasukan Garuda dapat meningkatkan alutsista TNI untuk menunjang pertahanan Indonesia. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Diplomasi, Deterrence, Damai Resolusi Konflik, Alutsista, Pengiriman Pasukan. Metode penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi besar didalam meningkatkan alutsista dan memproyeksikan persenjataanya di mata dunia melalui misi Perdamaian PBB. Walaupun demikian kebutuhan dari Pasukan Perdamaian PBB bukan hanya peningkatan persenjataan utama, melainkan juga adanya kebutuhan *Uninformed Capabilities* yaitu adanya kerjasama antara sipil militer dan para professional dibidangnya untuk membangun perdamaian di daerah tersebut. Peningkatan Alutsista yang dilakukan Indonesia penting ditingkatkan melalui pengiriman pasukan garuda yang lebih banyak jumlahnya.

**Kata Kunci:** Pengiriman Pasukan, Alutsista, Pasukan Perdamaian Garuda

**Abstract** – This research attempts to answer how Indonesia's defense diplomacy In the Garuda Troop Deployment In order to increase the Weapon Major Equipment system of the Indonesian National Army. Indonesia is one of the senders of the UN Peacekeeping Force, representing the top 10 in dispatching personnel and troop contributions. The need of each country to increase the defense equipment is a natural thing to strengthen its internal defense. According to the Minister of Foreign Affairs No. 1 of 2017 on the Vision and Mission of Indonesia in the 4000 *peacekeepers* Roadmap in 2019 about the deployment of Garuda troops as a tool of projection Alutsista Indonesia and the World. Indonesia also has several major defense equipment (*major equipment*) that other countries admire, such as the SS1 Long Barrel Rifle and Anoa Tactical Vehicle. Thus it is necessary to research the challenges and opportunities of how the dispatch of Garuda troops can increase the TNI Major Equipment System to support Indonesia's defense. To analyze

<sup>1</sup> Mayjen TNI . Tri Legionosuko, S.I.P., M.A.P. Dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Kolonel Caj Dr. Surryanto D.W., M.H., M.M., Dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Bintang Widagdo S.I.P., M.Han. Alumnus Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, pada Prodi Diplomasi Pertahanan

this research, researchers use Diplomacy Theory, Deterrence, Peace of Conflict Resolution, Major Equipment System konsep, Deployment of Forces. This research method is Qualitative Method with Description approaches. The results of this study show that Indonesia has great potential in improving defense equipment and projecting its weapon in the eyes of the world through the UN Peace mission. However, the need of the UN Peacekeeping Force is not only a major weapon increase, but also the need for Uninformed Capabilities that is the cooperation between military civilians and professionals in their field to build peace in the area. Increased Major Equipment System by Indonesia is important to be improved through the sending of more Garuda troops.

**Key words: Strategy, Defense Diplomacy, Deployment, Major Equipment Systems**

## Pendahuluan

Pertahanan negara Indonesia merupakan suatu kebijakan yang dibuat berdasarkan dari kepentingan nasional. Ruang lingkup pertahanan negara mencakup bagaimana sebuah negara dapat melindungi rakyat, dan memiliki kekuasaan atas batas wilayah di darat laut dan udara. Dasar Pertahanan Negara yang dibuat bangsa Indonesia ialah undang undang dasar 1945 yang didalamnya terdapat unsur untuk melindungi segenap rakyat, tanah air, dan warganya. Dalam buku putih pertahanan Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan, tujuan nasional Indonesia memiliki tiga makna sebagai berikut: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang berarti memberikan perlindungan bagi warganya dimana warga membutuhkan perlindungan negara. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka untuk meningkatkan harga diri dan martabat

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pandangan dunia Internasional dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan dan daya saing di dalam atau luar negeri. Ketiga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial untuk menciptakan lingkungan aman dan baik di global maupun didalam negeri.<sup>4</sup>

Sebagai komponen utama dalam menjaga pertahanan negara, maka profesionalisme TNI sebagai pasukan dibutuhkan didalam menjalankan tugas didalam maupun luar negeri. Kemampuan inilah yang akan menentukan kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer, nonmiliter maupun hibrida. Profesionalisme TNI menurut undang undang adalah terlatih, terdidik, terlengkapi secara baik guna menghadapi persiapan misi misi yang akan

---

<sup>4</sup> Kementerian Pertahanan. 2015. Buku Putih Pertahanan RI: Jakarta. hal. 2

dilaksanakan setiap waktu<sup>5</sup>.

Profesionalisme prajurit juga bisa didapat dari sejumlah latihan, pendidikan lanjutan, maupun pelaksanaan misi didalam dan luar negeri. Misi di dalam negeri merupakan penjagaan perbatasan, patroli rutin, serta pengawasan didalam pencegahan ancaman yang dapat mengancam kedaulatan negara dan bangsa. Sedangkan misi di luar negeri dilakukan dengan pengiriman pasukan perdamaian Garuda ke berbagai misi dibawah bendera perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Indonesia mengirimkan pasukan Perdamaian karena sejalan dengan tujuan nasional yang terdapat di pembukaan UUD 1945 berbunyi turut serta dalam ketertiban dunia, oleh sebab itu Indonesia berkomitmen untuk ikut serta didalam *peacekeeping operation* dibawah departemen perdamaian PBB *United Nation Departement of Peacekeeping Operation* (UNDPKO).

*Peacekeeping operation* yang dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB (United Nations). Operasi ini berada dibawah suatu departemen di United Nation yaitu *Peacekeeping Departement* yang bertujuan untuk

membantu negara-negara yang sedang dalam proses melakukan perundingan untuk mencapai perdamaian. *Peacekeeping Operation* menawarkan suatu bentuk kerjasama non militer untuk menjaga perdamaian antara kedua kelompok atau lebih yang berkonflik didalam suatu negara. Pada tahun 1948 *Peacekeeping Operation* dilakukan dengan mengirimkan pasukan ke negara Israel dimana terjadi konflik antara Israel dan negara Arab yang menentang pendirian Israel yang telah melakukan gencatan senjata. Hal ini merupakan awal mula dari misi *Peacekeeping Operation* (PKO) yang dilakukan PBB.

Ada dua bentuk partisipasi yang dapat dilakukan suatu negara di dalam *Peacekeeping Operation*. Pertama suatu negara yang menjadi anggota PBB dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan dana. Kedua, negara tersebut dapat berpartisipasi dengan mengirimkan bantuan pasukan keamanan. Kedua bentuk bantuan tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan dari dua kelompok yang berkonflik di suatu negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kementerian Pertahanan. 2015. Buku Putih Pertahanan RI: Jakarta. hal. 79

---

<sup>6</sup> Diakses Pada 3 Agustus 2017, <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml>

Indonesia termasuk sebagai salah satu Negara yang aktif berpartisipasi dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB, yang diberi nama pasukan Garuda. Indonesia pernah mengirimkan pasukan Garuda ke Mesir tahun 1952 dan meningkat secara bertahap. Namun jumlah pengiriman pasukan Garuda dalam misi *peacekeeping operation* sempat berkurang pada era Presiden Soeharto, karena saat itu Indonesia masih memprioritaskan untuk memperkuat keamanan di dalam negeri. Walaupun demikian, ketika pada zaman reformasi Indonesia mulai mengirimkan pasukan Garuda kembali.

Penugasan yang diberikan Indonesia di Pasukan Perdamaian PBB membuahkan hasil sehingga mendapatkan citra yang positif. Kemampuan Indonesia di penempatan tugasnya bukan hanya kemampuan militer. Tetapi sebagai seorang manusia prajurit TNI yang bertugas memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari contoh pelayanan masyarakat yang dibentuk Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL dengan menggunakan SMART CAR untuk berinteraksi dengan penduduk sekitar. Mobil pintar ini berisikan buku buku dengan berbagai macam bahasa, alat permainan edukasi dan film yang

memperkenalkan Indonesia (Agusalim, 2013). Bukan hanya itu saja, bahkan apresiasi yang diperoleh kontingen Garuda didapatkan langsung oleh Sekretaris Jendral PBB Ban Ki Moon. Didalam pidatonya, Sekjen PBB mengapresiasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia dalam 6 misi PBB yang paling sulit yaitu Lebanon, Haiti, Darfur, Liberia, Sudan Selatan dan Republik Demokratik Kongo.<sup>7</sup>

Negara yang ingin bergabung dan ikut serta dalam Pasukan Perdamaian PBB memiliki beberapa syarat. Negara yang ingin mengikuti harus memiliki kondisi militer baik dalam kapabilitas personalnya maupun memiliki alutsista yang memadai. Hal ini dibutuhkan guna menunjang keberhasilan pasukan perdamaian di misi tertentu.

Salah satu syarat dalam pengiriman pasukan perdamaian, setiap negara wajib menyesuaikan peralatan persenjataan guna memenuhi standar kebutuhan pasukan perdamaian. Ketentuan lain yang menjadi syarat yang diharuskan PBB untuk setiap pasukan yang masuk sebagai kontingen perdamaian harus mencantumkan adanya keahlian di

---

<sup>7</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/sekjen-pbb-apresiasi-kerja-pasukan-perdamaian-indonesia-143481726/106351.html> Diakses 16 September 2017.

beberapa bidang senjata dan alutsista. Oleh karena itu untuk meningkatkan keahlian individu masing masing pasukan, maka mereka harus mendapat pelatihan khusus didalam senjata api ringan, senapan mesin berat/ kanon ringan, dan anti tank jarak pendek dan jauh. Pasukan infantri yang bertugas di daerah misi mendapatkan pelatihan agar dapat menggunakan helikopter , tank maupun kendaraan lain (un.org). Ketentuan ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang berpartisipasi mengirimkan pasukan perdamaannya wajib melatih pasukannya agar dapat menggunakan segala jenis senjata tersebut secara mahir. Pemerintah Indonesia pun membutuhkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang memenuhi standard sebagai suatu sarana pendukung pelatihan pasukan TNI yang bertugas dalam *peacekeeping operation*.. Penggunaan alutsista secara mahir akan meningkatkan tingkat keberhasilan suatu misi dan memberikan gambaran bahwa suatu negara adalah kuat apabila memiliki alutista lengkap.

Peningkatan alutsista Indonesia yang digunakan didalam misi perdamaian merupakan suatu bentuk kesiapan kesatuan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas - tugas yang diberikan UNDPKO. Peningkatan standar

alutsista Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan peran Indonesia di dalam sebuah misi yang akan dilakukan *peacekeeping operation*.

Peningkatan alutsista yang dilakukan negara negara lain melalui misi perdamaian PBB ini sudah dilakukan oleh negara Bangladesh. Bangladesh merupakan salah satu yang mengirimkan pasukan terbanyak di dalam misi *peacekeeping operation*. Pengirim jumlah pasukan ini berbanding lurus dengan pemasukan yang mereka terima dari PBB. Pada tahun 2012 hingga 2013, menerima pemasukan senilai 74 juta Amerika Serikat Dollar AS, sebagai bentuk apresiasi PBB atas komitmen bangladesh untuk konsisten mengirimkan pasukan perdamaannya. Dengan adanya jumlah sebanyak ini, pasukan bersenjata Bangladesh dan kepolisian dapat membeli persenjataan yang baru untuk meningkatkan alutsista sendiri.<sup>8</sup> Operasi Peacekeeping juga merupakan sebuah alasan dari Bangladesh untuk meningkatkan alutsistanya dengan cara menyisihkan sebagian hasil atau gaji yang mereka peroleh dan memberikan

---

<sup>8</sup><http://www.providingforpeacekeeping.org/2014/04/03/contributor-profile-ethiopia/> ,Diakses 21 Juli 2017.

keuntungan ke militier atau kepolisian negara tersebut.

Selain kerjasama dengan luar negeri, Indonesia memiliki sebuah kendaraan tempur yaitu Anoa sebagai suatu bentuk kebanggaan akan alutsista buatan dalam negeri PT Pindad. Kendaraan tempur Anoa ini sudah mendapatkan pengakuan dari Menteri Luar Negeri India Jenderal (Purn) Vijay Kumar Singh dikala pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada kunjungan negara Indonesia ke India pada 12 Desember 2016<sup>9</sup>. Kendaraan tempur Anoa juga sudah dikirimkan ke Pasukan Perdamaian PBB untuk mendukung mobilisasi pasukan Garuda di beberapa misi seperti di UNIFIL. Pengiriman kendaraan tempur yang sudah dilakukan Indonesia mendapatkan dampak di dalam positif didalam riwayat untuk bertugas. Ranpur Anoa yang sudah digunakan Indonesia di misi UNIFIL (Lebanon) telah menunjukan keefektifan didalam bertempur. Hal ini juga merupakan penunjukan kebolehan Ranpur buatan PT Pindad ini, dilihat pada tahun 2013, Singapura dan Malaysia menyatakan ketertarikan terhadap ranpur ini karena

penampilan dan keandalan dalam bertugas di daerah tempur UNIFIL. Dengan kehandalan ranpur tersebut, kedua negara berminat untuk membelinya karena memiliki kemampuan *defensive dan mobilisasi* yang baik, sehingga sesuai dengan situasi penjaga perdamaian khususnya di UNIFIL.<sup>10</sup>

Pengiriman pasukan Garuda Merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia didalam meningkatkan kapabilitas militer dan citra luar negeri Indonesia sebagai bentuk Diplomasi Pertahanan. Indonesia juga akan dapat melatih pasukan secara gratis dikarenakan sistem penggantian atau *Reimburse* yang dikirimkan kepada PBB. Pemerintah Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu ikut serta didalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia juga menjadikan pengiriman pasukan Misi Penjaga Perdamaian PBB menjadi sebuah kesempatan untuk meningkatkan alutsista yang sesuai dengan Permenlu no 1 tahun 2017. Tentang Road Map Vision Indonesia 4000 Personil Tahun 2015 – 2019. Dengan meningkatkan alutsista dan menjadikan acuan atau proyeksi persenjataan Indonesia secara global.

---

<sup>9</sup><http://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/17501271/menlu.india.puji.panser.anoa.buatan.pt.pindad> , diakses 11 September 2017.

---

<sup>10</sup><https://finance.detik.com/industri/2227007/malaysia--singapura-kepincut-panser-anoa-made-in-bandung> , diakses 11 Juli 2017.

Pengiriman pasukan Garuda ke Misi Perdamaian, dirasa kurang dari jumlah kuantitasnya. Mengingat visi Indonesia yang tertera didalam permenlu tersebut berjumlah 4000 orang. Jumlah ini masih kurang dari setengahnya dari Negara negara yang cenderung lebih miskin dari Indonesia seperti Ethiopia dan Bangladesh.

Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dari pada negara berkembang lainnya seperti Ethiopia, Bangladesh di dalam melatih pasukan perdamaian serta lokasi yang sangat memadai. Di sisi lain Pengiriman pasukan Garuda ke PBB mendapatkan tantangan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh PBB mengingat peluang yang dimiliki dan kesempatan untuk menunjukan posisi alutsista yang Indonesia miliki dengan standart dari pasukan Perdamaian PBB. Peraturan Permenlu no 01 tahun 2017 mendukung pengiriman Pasukan Garuda sebagai peningkatan kapabilitas alutsista yang menjadikan standar alutsista PBB sebagai proyeksinya menurut MOU dan perlengkapan *major equipment* yang dimiliki negara lain.

Dengan mengirimkan pasukan Garuda, serta mengirimkan Alutsista kendaraan tempur Anoa untuk

melakukan tugas Misi Perdamaian. Maka Indonesia mendapatkan respon positif dan pengakuan dari negara yang bertugas didalam satu wilayah. Karena itu Indonesia mendapatkan kesempatan melakukan peningkatan alutsista di bidang lainnya guna meningkatkan suatu posisi tawar yang positif di mata internasional.

Untuk itu peneliti membuat sebuah penelitian dalam sebuah pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengiriman pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam rangka peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia? Pertanyaan utama penelitian tersebut kemudian dirumuskan kedalam dua pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengiriman pasukan Garuda sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia?
2. Bagaimana Pengiriman pasukan Garuda dapat Mendorong untuk Peningkatkan Alutsista Tentara Nasional Indonesia?

### **Daya Gertak (Deterrence)**

Menurut Profesor Branislav L. Slantchev dari Universitas California teori deterrence yang berarti menggentarkan yaitu sebuah tindakan kepada lawan untuk

tidak melakukan aksinya. Sebagai sebuah negara kita memperingatkan atau secara tidak langsung menunjukkan apa konsekuensi yang akan didapat dari aktor yang melakukan tindakan merugikan seperti perang. Apabila seperti contoh ada lawan yang “melebihi ambang batas” maka akan diberikan konsekuensi. Hal ini seperti pemerintah yang membuat hukuman yang berat apabila tindakan kriminal dilakukan, sehingga para pelaku akan berpikir kembali apabila melakukan tindakan tersebut. deterrence juga bersifat untuk mencari status quo, dimana target yang diperoleh adalah suatu keadaan yang sama dan mencegah perubahan status. Pada dasarnya adalah seperti permainan yang menunggu, lawan harus bergerak setelah itu baru bereaksi.

Ada dua tipe deterrence yang dikemukakan profesor Slanctchev, tipe pertama yaitu aktor aktor yang menghargai hubungan antara yang bertahan dan yang menantang serta tipe yang kedua adalah aksi yang diduga. Ide ini adalah para yang bertahan memiliki sesuatu untuk menahan yang penantang untuk melakukan perubahan status quo.

Pernyataan yang didukung oleh Professor Barry Buzan (1984) teknologi juga merupakan hal yang penting didalam teory deterrence. Barry Buzan

mengatakan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi yang merupakan kekuatan militer suatu negara, akan mencegah negara lain untuk melakukan tindakan yang agresif. Oleh sebab itu Buzan menitik beratkan kepada perlombaan senjata yang terjadi pada masa perang dingin antara AS dan Uni Soviet. Pada masa tersebut perlombaan senjata dimulai dari paska perang dunia kedua yang memisahkan antara Berlin barat dan Berlin Timur. Kedua negara sama sama melakukan peningkatan senjata dimulai dari angkutan perang darat seperti tank, peningkatan alusista seperti pesawat, dan peningkatan senjata lainnya hingga sama sama menciptakan senjata pemusnah massal atau nuklir.<sup>11</sup>

Perlombaan senjata yang dilakukan setiap negara bertujuan untuk melakukan suatu bentuk dari tindakan pencegahan yang dilakukan. Setiap negara akan membandingkan kekuatan alusista dari negara lainnya. Dengan demikian ada muncul sebuah faktor yang tidak kelihatan untuk menempatkan kekuatan serta bargaining position di mata Internasional. Peningkatan alusista yang dilakukan negara negara merupakan

---

<sup>11</sup> Buzan, Barry; *An Introduction Strategic Studies Military Technology and International Relations*: 1987, The Macmilla Press LTD. London. hl.234.



salah satu bentuk dari meningkatnya kebutuhan demi keamanan nasional didalam menjaga kepentingan nasional dan keamanan dari ancaman konvensional.

### **Diplomasi Pertahanan**

Diplomasi pertahanan merupakan perkembangan dari teori diplomasi, diplomasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu negara atas negara lainnya, institusi, dan organisasi internasional dengan tujuan utama mencapai kepentingan nasional dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, politik, social budaya dan keamanan nasional. Sedangkan menurut Melissen dalam paper Asianto Sinambela<sup>12</sup> mendefenisikan diplomasi adalah mekanisme representasi, komunikasi dan negoisasi yang melaluinya negara-negara dan aktor internasional lainnya melaksanakan kegiatan. Sumaryono mendefenisikan diplomasi bahwa cara didalam perundingan dan bukan sebagai objek, melainkan tujuan diplomasi adalah suatu kebijakan luar negeri dan mencapai kepentingan nasional negara . Dari pengertian diplomasi tersebut dapat

disimpulkan bahwa diplomasi adalah untuk mencapai kepentingan nasional negara kepada negara lain dengan melakukan kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral.

Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia adalah sebuah kerjasama antar lembaga ataupun instansi yang berhubungan dengan negara lain didalam urusan pertahanan dan kepentingan nasional. Dengan adanya diplomasi ini citra positif dapat timbul dari negara yang mau bekerja sama untuk mengurus keamanan dan pertahanan di kawasan. Contoh dari kerjasama yang telah Indonesia lakukan yaitu adanya kerjasama dari bidang *Joint Patrol* di selat Malaka dengan EiS (*Eyes in The Sky*) yang bekerja sama dengan negara Malaysia Singapura, bahkan menarik perhatian Thailand untuk bergabung dengan perjanjian ini. Dari pengertian diplomasi tersebut dikembangkan adanya diplomasi pertahanan dimana diplomasi pertahanan dengan tujuan membentuk suatu kerjasama internasional dalam bidang pertahanan dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara. menurut Parulian Simamora diplomasi pertahanan adalah untuk mengajar tujuan kepentingan nasional dengan

---

<sup>12</sup> Asianto, Sinambela; 2017: *Penjelasan Umum Mengenai Blue Print, Arah dan Strategi Diplomasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Jakarta, Proceeding Bank Indonesia hal. 24.

menggunakan kebijakan luar negeri secara damai dan sumber daya pertahanan. Tujuan diplomasi pertahanan (secara teoritis), antara lain:<sup>13</sup>

1. Sebagai kehadiran atau perwakilan (*representation*);
2. Mempunyai efek/daya tangkal (*deterrent effect*);
3. Dengan memberikan penerangan tentang apa yang kita kerjakan (*transforming the way we work*);
4. Melakukan negosiasi dan posisi tawar (*negotiation and bargaining position*);
5. Meningkatkan kemampuan (*increasing credibility*);
6. Menurunkan keinginan negara yang berseberangan kepentingan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan (*decreasing opponen't stakes*);
7. Pengumpulan data intelijen dan informasi laporan (*information gathering or intelligence*)
8. Membentuk opini publik (*to form public opinion*)
9. Mempromosikan hukum internasional (*confidence building measures*)
10. Membangun saling percaya.

---

<sup>13</sup> Simamora, Parulian; 2013: *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*, Yogyakarta, Graha Ilmu. hal. 136.

Pemahaman akan pengertian diplomasi pertahanan dan tujuan diplomasi pertahanan tersebut mengarahkan adanya tiga katakteristik dari diplomasi pertahanan, yaitu:<sup>14</sup>

1. Kerjasama dilakukan oleh militer untuk membangun kembali infrastruktur suatu negara karena suatu kondisi.
2. Penggunaan peran militer tidak lagi terbatas pada peran yang bersifat tradisional, tetapi peran militer telah meluas pada menjaga kestabilan, perdamaian dan mempromosikan good governance.
3. Kerjasama pertahanan tidak hanya pada negara yang bersekutu, tapi meluas pada negara yang tidak bersekutu, namun membutuhkan bentuk kerjasama tersebut dan bahkan pada negara yang sedang bersaing

Diplomasi Pertahanan memiliki peranan utama dalam menciptakan kerjasama yang strategis antara negara, membangun hubungan tanpa kecurigaan antara militer dengan masyarakat sipil, serta membantu negara lain dalam

---

<sup>14</sup> Simatupang, G. (2013). *Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan*. Quartedeck, 11.

penegakan keamanan dan pemeliharaan perdamaian.<sup>15</sup>

Dengan demikian arti dari konsep Diplomasi pertahanan di penelitian ini adalah Pengiriman pasukan garuda merupakan salah satu bentuk dari alat Diplomasi sebuah negara didalam menciptakan citra positif. Hal ini dikarenakan negara yang mengirimkan pasukan untuk misi Perdamaian PBB dianggap kooperatif dan berjuang demi kesejahteraan dan kedamaian dunia. Selain itu dengan turut serta menjaga perdamaian, maka nilai dan posisi tawar suatu negara akan menjadi positif di mata internasional.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi dengan menggunakan instrument objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>16</sup> Sedangkan Pendekatan studi kasus merupakan rancangan penelitian yang dapat berupa

evaluasi dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam dari suatu kasus, peristiwa, aktivitas, proses dari satu individu atau lebih.<sup>17</sup>

Penelitian kualitatif digunakan dengan harapan penulis dapat mengeksplorasi keterkaitan variabel-variabel pada penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis secara kualitatif mengenai pelaksanaan Pengiriman Pasukan Garuda Dalam Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista TNI. Penulisan penelitian kualitatif ini akan difokuskan pada penggunaan sumber data primer berupa *in depth interview* dan data sekunder berupa studi pustaka.

Teknik analisa data oleh Creswell yang digunakan dalam penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut;

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dilakukan analisis
- 2) Membaca keseluruhan data
- 3) Memulai melakukan *coding*
- 4) Menerapkan proses *coding*
- 5) Analisis kemudian dideskripsikan guna menjawab pertanyaan penelitian

---

<sup>15</sup> Yani, Yayan Mochamad; Montratama, Ian; Mahyudin, Emil, 2017: *Pengantar Studi Kemaaman*, Malang, Intrus Publishing.

<sup>16</sup> Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

---

<sup>17</sup> Creswell, J.W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

6) Pembuatan interpretasi data.<sup>18</sup> Tahap terakhir ini terkait pemaknaan sejauh mana aktivitas pengiriman pasukan Garuda dan pengaruhnya terhadap peningkatan Alutsista TNI.

### **Peningkatan Alutsista**

Pengantar Studi Kemaamanan menjelaskan Alutsista yang Indonesia katagorikan adalah peralatan bersenjata yang berfungsi untuk melindungi negara, hal tersebut biasanya digunakan pihak yang berwajib seperti TNI dan POLRI. Alutsista yaitu berupa senjata api yang digunakan setiap individu, Tank dan Ranpur sebagai alat utama dalam pasukan kavaleri, pesawat tempur untuk pasukan TNI angkatan udara, dan kapal perang hingga misil penghancur pesawat yang dimiliki oleh TNI angkatan Laut.

Beberapa peralatan senjata yang dikirimkan ke dikirimkan pasukan garuda merupakan senjata api ringan/berat, kendaraan tempur seperti Anoa, dan kendaraan tempur ringan. Hal ini merupakan Alutsista yang diperiksa oleh tim COE (*Contingent Owned Equipment*) di Libanon pada 18 Desember 2012.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> <http://www.tribunnews.com/internasional/2012/12/18/ada-apa-pbb-periksa-alutsista-pasukan-tni-di-lebanon-foto>. diakses pada 5 September 2017.

Peningkatan kapabilitas Alutsista yang dikemukakan oleh Profesor Barry Buzan adalah salah satu perlombaan peningkatan alutsista yang dilakukan dari setiap negara. Didalam konsep ini, setiap negara akan berlomba lomba untuk meningkatkan kemampuan militernya guna mendapatkan posisi tawar lebih tinggi daripada negara lain. Peningkatan ini juga dilakukan guna mengatasi hegemoni kekuatan militier lawan yang dapat mengancam keamanan negara. Dapat diberikan contoh didalam peningkatan Alutsista ini. Ilustrasinya adalah, pada masa Mesir kuno yang pada waktu itu menggunakan senjata yang terbuat dari perak, dikalahkan oleh musuh yang menggunakan senjata pedang besi. Yunani kuno dapat mengalahkan musuh Persia yang lebih banyak karena mereka menggunakan baju zirah, sehingga memiliki taktik untuk membuat formasi tertutup yang mencegah panah musuh. Penggunaan dan penelitian untuk membuat tombak, corsbow, kapak, mengakhiri zaman kejayaan dari pasukan kuda berzirah dan pasukan pejalan kaki pada pertengahan abad Eropa. pada abad ke 14 senjata meriam tradisional membuat tembok tinggi penjagaan menjadi sangat lemah. Pada akhir 1850an pembangunan kapal,

mesin uap, dan senjata api menjadi momok yang menakutkan hingga tiga abad selanjutnya.

Peningkatan alutsista dan Modernisasi senjata pertahanan merupakan hal yang serupa dengan maksud dan tujuan dari Profesor Barry Buzan, penulis mengungkapkan hal ini dengan maksud dari tujuan yang sesuai dari permenlu no 1 tahun 2015 tentang visi misi road map Indonesia menuju 4000 *peacekeepers*.

Cerita sejarah jelas memberikan contoh pentingnya sebuah teknologi militer dan alutsista untuk mengembangkan strategi militernya, karena itu setiap negara berlomba lomba meningkatkan kemampuan kapabilitas militernya untuk mencegah dan menjaga keamanan dalam negeri dari musuh. Harry Buzan memiliki prinsip dari efek militer yang dapat di indikasikan dengan lima kemampuan, Firepower, Protection, Mobility, Communications, dan Intellegence.<sup>20</sup>

#### 1. Firepower

Revolusi teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap Firepower. Yang dimaksud disini

adalah bagaimana daya ledak dan daya hancur yang luar biasa. Pada masa sekarang nuklir memiliki firepower yang paling besar dan mendominasi dunia internasional. Dengan demikian Firepower memiliki peranan penting dalam pembaharuan suatu Alutsista.

#### 2. Protection

Protection merupakan kebalikan dari konsep Firepower. Dalam hal ini apabila suatu negara memiliki suatu kekuatan Firepoweri sebagai salah satu sifat untuk menyerang, protection lebih mengarah untuk bertahan. Sebagai contoh adanya kekuatan senapan laras panjang yang kuat, akan lemah dengan adanya rompi anti peluru yang lebih memadai. Faktor ini yang menyebabkan kebutuhan sebuah Alutsista untuk melindungi diri sendiri dari serangan musuh.

#### 3. Mobility

Revolusi dari salah satu indikator mobiliti sudah dimulai dari abad 19, yaitu ketika dilaut perahu menggunakan layar pada mulanya, lalu berkembang menjadi mesin uap. Walaupun mesin uap tersebut memiliki berat yang lebih daripada perahu layar, tetapi dapat membuat kapal perang enam kali lebih besar daripada perahu kayu. Contoh ini membuktikan bahwa

---

<sup>20</sup> Buzan, Barry. 1987: *An Introduction Strategic Studies Military Technology and International Relations*, London, Macmillan Press LTD. hal 25.

mobility merupakan kemampuan untuk mengangkut barang yang akan berguna untuk peningkatan Alutsista di medan perang.

#### 4. Communication

Komunikasi merupakan kebutuhan dari strategi koordinasi antara sesama individu maupun tim. Dengan menggunakan alat komunikasi seperti walkie talkie maupun sandi lainnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu koordinasi agar lebih tertib, disiplin dan tepat sasaran.

#### 5. Intelligence

Intelejensi menurut Buzan berhubungan dengan komunikasi tingkat yang tertinggi. Hal ini sama dalam kemampuan untuk berhubungan dari pasukan dan markas besar. Tetapi pasukan khusus ini memiliki perbedaan, yaitu mengirimkan informasi yang akurat tentang posisi musuh, jumlah, dan sebagainya guna memberikan informasi kepada pasukan yang akan masuk ke medan pertempuran.

### **Analisis Data dan Pembahasan**

Penelitian ini berfokus pada aktivitas diplomasi pertahanan didalam pengiriman Pasukan Garuda dan sebagai suatu bentuk peningkatan Alutsista TNI

berdasarkan dari pengiriman pasukan. Fokus ini melihat adanya diplomasi pertahanan Indonesia didalam pengiriman Pasukan Garuda serta bagaimana peningkatan Alutsista TNI berhubungan dari pengiriman pasukan ini.

### **Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia**

Diplomasi Pertahanan Indonesia yang sudah dilakukan pemerintah Republik Indonesia merupakan salah satu tujuan nasional yang begitu penting karena Indonesia memiliki kepentingan nasional didalam Pengiriman Pasukan Garuda Ini. Salah satu alasan dan contohnya adanya visi dan misi Indonesia untuk dapat mengirimkan pasukan sebanyak 4000 personil dalam rangka untuk mencapai ranking 10 besar top kontributor negara negara berkembang. Didalam hal ini Indonesia juga berkepentingan untuk masuk menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Dengan demikian Indonesia juga dapat menyuarakan kepentingannya dan memiliki kekuatan atau Power di mata Internasional dan Regional.

Prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pasukan Garuda adalah sebagai suatu kebanggaan, dimana ada pengakuan oleh

Sekjen PBB pada waktu itu Kofi Annan kepada Kontingen Garuda (KONGA) yang bertugas di UNIFIL. Hal ini begitu penting mengingat UNIFIL adalah salah satu wilayah yang paling rawan dan strategis di mata internasional karena menyangkut perbatasan Lebanon dan Israel. Indonesia berhasil menorehkan pujian dengan pekerjaannya mengirimkan SMART CAR sebagai konsep yang lebih mengayomi. Sehingga di berbagai wilayah Lebanon Selatan, nama Indonesia harum, bahkan banyak adanya warga Lebanon yang memanggil pasukan “GARUDA GARUDA” sebagai suatu sahabat atau teman. Dari sudut pandang pemerintahan Indonesia, hal ini sudah menjadi perjuangan yang baik dan prestasi ketika Pasukan kita diterima Rakyat Libanon.

Selain itu Indonesia mempunyai kepentingan nasional dalam mengirimkan pasukan Garuda, Indonesia juga masih mengincar kursi dewan keamanan PBB tidak tetap. Kementrian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir pada Mei 2017 mengungkapkan, bahwa Indonesia akan terus berusaha untuk menjadikan dan merebut kursi dewan keamanan PBB untuk mencegah dan menyuarakan kepentingan Indonesia di mata dunia. contoh dari hal ini ketika adanya negara lain yang memiliki kepentingan di wilayah

regional Indonesia, maka apabila Indonesia tidak dapat menyuarakan suaranya, maka kemungkinan Indonesia untuk memenangkan masalah semakin kecil dampaknya. Hal ini juga mencegah adanya kepentingan insurgensi maupun organisasi non pemerintah yang mengklaim dan menjelek jelekkan Indonesia. Maka Indonesia akan mudah untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi.

Kepentingan nasional yang diperlukan didalam menjaga kedaulatan dan keutuhan RI adalah adanya insurgensi. Kasus Free West Papua yang terjadi hingga sekarang merupakan kasus yang tidak bisa dikesampingkan. Didalam UNPFII (United Nations For Indigenous Peoples) gerakan Free West Papua mendapatkan tanggapan dari pihak PBB. Hal ini dapat dilihat dimana perwakilannya dapat bersuara dan memiliki posisi di UNPFII. Pada tahun 2009 hampir saja oknum papua merdeka berhasil membujuk dewan keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi tentang Papua. Untungnya pada saat tersebut ada perwakilan Indonesia di DK PBB, sehingga Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia, dan yang berbicara adalah oknum tidak bertanggung jawab.

Pada hal inilah dibutuhkan Posisi Indonesia untuk menjadi Dewan Keamanan PBB.

Adapun tugas Dewan Keamanan PBB yang diinginkan Indonesia adalah:

- Menginvestigasi keadaan apapun yang mengancam keselamatan umat manusia dan dunia
- Memberikan rekomendasi kepada Sekjen PBB untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan dengan prinsip perdamaian Dunia
- Memberikan sanksi kepada negara negara anggota yang melanggar resolusi PBB yang telah dibuat
- Melakukan pertimbangan apabila negara negara lain mau menjadi anggota PBB
- Menjaga kedamaian dunia

Pengaruh dari pengiriman Pasukan Garuda, juga bagi Indonesia dan negara negara kontributor pasukan perdamaian. PBB mengetahui betul bahwa negara negara yang mengirimkan pasukan perdamaian tersebut adalah sebagai suatu bentuk kepentingan politik. Termaksud Indonesia yang memiliki suatu kepentingan tersendiri. Kepentingan itu mengutamakan suatu gambaran diplomasi, sebagai contoh apabila Indonesia mengirimkan pasukan PBB, kita

bukan hanya kita dapat meningkatkan profesionalisme TNI, melainkan di pandangan dunia, Indonesia akan menjadi sebuah negara yang dianggap baik dan demokratis. Hal ini lah yang menyebabkan kita memiliki kepentingan nasional tersebut.

### **Peningkatan Alutsista TNI**

Konsep Alutsista atau Alat Utama Sistem Senjata yang digunakan bagi semua negara merupakan instrumen yang pokok didalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Instrumen ini dapat dilihat dengan cara dibandingkan atau mengetes senjata senjata dan jenis amunisi yang digunakan di medan perang. Terdapat kendala pengetesan senjata sebagai sebuah dilema, Dunia Internasional tidak akan dapat mengetahui sejauh mana efektifitas alutsista yang digunakan sampai benar-benar digunakan didalam penggunaan didalam perang maupun tidak. Seperti contoh pesawat baru F22 Raptor Amerika Serikat mengudara pada invasi Irak 2001. Hal ini menunjukan keinginan untuk memamerkan persenjataan yang digunakan seluruh negara.

PBB memiliki suatu standart pengiriman pasukan agar dapat dikirimkan ke daerah misi dan siap



menjalani dengan sistem batalyon maupun kompi. Dengan demikian persiapan yang dilakukan sebelum adanya misi berada di PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) yang bertugas dibawah MABES TNI. Dalam hal ini TNI bertugas langsung sebagai pelaksana dalam menyiapkan, mengevaluasi macam macam alutsista yang akan diberangkatkan ke daerah operasi. Dari Senapan Laras Panjang, kendaraan taktis, hingga helikopter untuk membantu kepentingan misi perdamaian Internasional. Persiapan ini dilakukan guna menjadikan proyeksi kekuatan Indonesia ketika dihadapkan dengan pasukan negara lain di Misi Perdamaian PBB.

Indonesia sudah berhasil mengirimkan pasukan Perdamaian dalam jumlah yang besar, ini berarti Alutsista Indonesia sudah diterima di dunia Internasional sehingga bagi mata dunia memiliki sistem yang baik dan bagus untuk pertahanan. Dengan kelengkapan persenjataan, perlengkapan tambahan, terutama perlengkapan untuk skill atau keahlian khusus setiap personil TNI sehingga menjadi sebuah aktor untuk diplomasi Pertahanan Indonesia. Persiapan Alutsista pun sudah dilakukan dari awal serta pelatihan yang sesuai

dengan MoU dan Perlengkapan tambahannya.

Dalam Penelitian Indonesia mendukung penuh peningkatan Alutsista dalam pengiriman pasukan Garuda. Hal ini dilihat bahwa Indonesia pernah mengirimkan bantuan bukan hanya Personil saja, melainkan kelengkapan Helikopter pada 22 Agustus 2014. Atas permintaan United Nations Departement Peacekeeping Operations, Indonesia mengirimkan satgas helikopter MI-17 TNI ke misi perdamaian di Mali (MINUSMA). Misi ini bukan hanya peacekeeping saja melainkan sudah ke ranah multidimensional di daerah tersebut. Helikopter ini diminta Oleh PBB dari misi Perdamaian di Darfur (UNAMID) ke Mali. Peraturan ini tertulis pada peraturan presiden Nomor 78 tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2015.<sup>21</sup>

Pendanaan yang dilakukan dari pengiriman Helikopter MI 17 menggunakan dana operasional APBN dalam kementerian Pertahanan. Serta menggunakan anggaran PBB untuk pengiriman, operasi, perawatan, peralatan, pengembalian dan

---

<sup>21</sup> <http://setkab.go.id/indonesia-kirim-kontingen-satgas-helikopter-mi-17-tni-ke-misi-perdamaian-di-mali/> diakses pada 27 Oktober 2017.

penambahan Konga Satgas Heli Minusa yang sedang berjalan. Pendanaan Pada APBN meliputi:

- Penyiapan Personel Konga Satgas Heli Mi – 17 MINUSMA sebagai kualifikasi permintaan PBB
- Pengadaan atau pembelian peralatan dan perlengkapan perorangan dan kesatuan serta perlengkapan khusus yang diperlukan konga satgas Heli
- Peningkatan kapasitas Personel dan peningkatan spesifikasi teknis peralatan yang tersedia namun belum memenuhi spek
- Penarikan konga satgas heli atas kebutuhan dalam negeri.

Selain Helikopter MI 17, pemerintah Indonesia juga sempat mengirimkan kapal perang di misi perdamaian yaitu mengirimkan kapal perang KRI Diponogoro – 365. Kapal perang ini termaksud yang terancang dari jajaran kapal eskorta komando Armada RI kawasan Timur dari kelas Sigma dan helikopter bolcow 105 dari wing udara. Tugas dari pengiriman kapal perang terancang ini ditujukan untuk membantu Pasukan Perdamaian PBB satgas Maritim Task Force (MTF) Konga XXVII-A/UNIFIL selama satu bulan. Pengiriman satgas laut menurut Kasum TNI adalah sebagai

Tanggung jawab negara yang selalu berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia menurut UUD 1945. Peran aktif inilah direalisasikan dengan pengiriman kapal perang paling canggih pada saat tersebut. hal ini berarti pengiriman satgas laut yang pertama kali, di Perdamaian PBB. Tetapi hal ini akan berpengaruh secara signifikan karena melengkapi komposisi UNIFIL maritim task Force dari negara negara Eropa seperti Spanyol, Jerman, Belanda, Belgia Turki dan lain lain. Dan ini sebagian juga karena prestasi yang telah ditorehkan prajurit TNI sebelumnya saat di UNIFIL dengan mengedepankan tentara yang profesional dan dapat bergaul dengan masyarakat setempat, sehingga Indonesia menjadi dapat untuk menambah pasukan perdamaian di Lebanon selatan. Posisi Indonesia penting karena merupakan Negara yang diminta langsung oleh PBB dari UNIFIL, hal ini penting untuk menunjukkan kenetralan dan imparial dari resolusi PBB nomor 1701.<sup>22</sup> (Puspen, 2009)

### **Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista TNI**

---

<sup>22</sup><http://www.tni.mil.id/view-11996-indonesia-kirim-kapal-perang-ke-lebanon.html>. diakses pada 13 Oktober 2017.

Diplomasi yang dilakukan Indonesia menurut kegiatan dan kepentingan nasionalnya merupakan suatu bentuk dari perlindungan diri dan pertahanannya. Penggunaan diplomasi yang dilakukan Indonesia merupakan bentuk dari *soft power* karena menggunakan suatu kekuatan tanpa menggunakan hal hal yang mengarah kepada perang atau kekerasan. Konsep ini sudah lama dipakai pada masa pertengahan, dimana apabila ada kedua kubu yang bertikai, maka mereka akan melakukan negosiasi dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan yang diberikan kedua belah pihak agar negosiasi menjadi lebih aman dan nyaman sehingga dapat memikirkan apa yang baik dari kedua belah pihak. Kegagalan berdiplomasi dapat mengakibatkan perang dalam waktu singkat maupun lama dan juga adanya korban jiwa yang dapat mengacaukan keselamatan diri sendiri maupun kelompok. Pengiriman pasukan Garuda PBB sudah menyampai hampir di angka 4000, sebenarnya angka ini realistis apabila mengacu kepada Kepres 1 2017 tentang roadmap visi dan misi 4000 pasukan perdamaian PBB. Dengan adanya roadmap ini diharapkan Indonesia lebih dipandang sebagai negara penyalur pasukan yang berdampak kepada

terpilihnya kembali Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.

Perdamaian yang diinginkan Indonesia yaitu berasaskan untuk menjaga perdamaian tanpa menindas bangsa lain. Seperti contoh didalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon selatan, Indonesia sangat dipuji oleh sekjen PBB dalam melaksanakan misinya. UNIFIL merupakan prestasi Indonesia karena memiliki jumlah yang paling banyak ditempatkan yaitu 1288 personil. ([unifil.unmissions.org](http://unifil.unmissions.org)) . Kepercayaan yang tidak jauh tergoyahkan karena pasukanya yang cenderung menyatu dengan masyarakat Lebanon selatan. Hal ini juga merupakan sebuah kesempatan bagi Negara Indonesia untuk dapat lagi menjadi pemacu bagi misi misi PBB lainnya.

Pada dasarnya konsep yang digunakan dari *United Mission Peacekeeping Operations* adalah menjaga dan mengamankan suatu daerah misi yang telah mengalami eskalasi konflik, ini berarti intensitas konflik bersenjata maupun yang berbahaya sudah mulai berkurang. Walaupun demikian pasukan perdamaian masih dikirimkan dengan menggunakan alutsista yang tergolong lengkap dan memadai untuk melakukan kondisi siap tempur. Hal ini akan

membuat rasa tidak nyaman bagi negara rumah misi perdamaian. Kehadiran militer PBB masih tergolong asing dan menakutkan bagi masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan adanya traumatic pasca perang dan menganggap segala bentuk militer adalah musuh bagi rakyat tersebut. Karena hal tersebut militer dianggap sama saja dan bukan menjadi penolong tetapi hanya menjadikan sumber traumatik. Pasukan Garuda menjadi garis depan dalam menyampingkan kondisi tersebut. Prestasi yang diakui adalah pengayoman yang dilakukan pasukan Garuda bukan hanya dalam penjaga pengamanan saja, melainkan juga pengiriman suatu bentuk “Smart Car” didalam operasinya. Inisiatif ini dipandang baik oleh Sekjen PBB pada waktu itu Kofi Annan, Indonesia bukan membantu peacekeeping saja, melainkan memasukan konsep Peacebuilding serta mendekatkan diri kepada Rakyat Lebanon.

Aktor diplomasi yang dijelaskan menurut Nye, adalah segala bentuk kegiatan yang menunjukkan citra jati diri suatu bangsa kepada seluruh dunia. pencitraan yang dilakukan dari negara negara kontributor pengirim pasukan perdamaian PBB memiliki beberapa alasan untuk mengikuti pengiriman ini.

Seperti ada kepentingan lain yang dibutuhkan dari negara Bangladesh yang mengirimkan pasukan perdamaian untuk meningkatkan alutsista mereka dengan cara memberikan doktrin kepada personil yang bertugas di Misi Perdamaian untuk menyumbangkan bagianya kepada pemerintah Bangladesh. Dengan demikian Bangladesh dapat membeli alutsista dari pemotongan gaji personil tersebut. Instrumen Misi perdamaian yang dilakukan negara tersebut mengakibatkan perlombaan untuk mengirimkan pasukan yang tadinya bertujuan untuk melakukan *soft power*, malah digunakan sebagai sumber daya memperkuat militernya. Ini merupakan salah satu bentuk dari penguatan *hard power*. Hal ini bertolak belakang dengan konsep diplomasi yang dibentuk dari model pasukan perdamaian yang bertugas untuk menjaga dan membuat keadaan menjadi damai.

Pengiriman pasukan Garuda juga merupakan operasi militer non perang yang merubah suatu konsep *deployment* pasukan yang biasanya untuk berperang, tetapi kali ini dipakai untuk perdamaian. Perlakuan ini mengubah paradigma dari militer yang selalu siap tempur dan pasti kasar apabila digunakan di segala misi. Berbeda dengan pengiriman

pasukan yang selama ini dilakukan sebelum Misi Perdamaian PBB dibentuk. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua menjelaskan pentingnya sebuah pengiriman pasukan untuk membantu ataupun memukul musuh yang mendiami di daerah tersebut. konsep dari penjagaan diserahkan kepada polisi militer. Tetapi untuk perdamaian tidak dilakukan karena konsep yang digunakan adalah hard power atau perang. Konsep yang dijelaskan di Chapter VII di piagam PBB juga menegaskan kebolehan untuk menggunakan senjata didalam “melerai” atau memaksa sebuah keadaan menjadi damai. Intervensi ini dapat dilakukan oleh keputusan dewan keamanan PBB untuk melakukan peleraian antara kedua belah yang bertikai, dan menggunakan pasukan perdamaian untuk menjadi peacemaker dengan kekerasan.

Dengan demikian Pembahasan dari penggunaan teori Diplomasi, Konsep pengiriman Pasukan Garuda dan kepentingan nasional. Dapat dijalankan dengan baik seturut dengan kepentingan Diplomasi Pertahanan Indonesia guna menjaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia di dunia. selain itu pengiriman Pasukan Garuda diharapkan lebih dapat bekerja dalam bidang bukan hanya penjaga perdamaian dengan

menggunakan senjata saja sebagai bentuk diplomasi Indonesia dalam memproyeksikan kekuatannya. Tetapi juga keinginan untuk dapat mengedepankan faktor yang lebih humanis lagi didalam pelaksanaanya. Dengan demikian kepentingan dan diplomasi pertahanan Indonesia menjadi lebih baik dengan mengirimkan pasukan perdamaian tetapi lebih mengarah kepada Civilian Militari society.

Menurut Profesor Barry Buzan, yang menyatakan adanya securiti dilemma sebagai sebuah negara menghadapi bagaimana persaingan persenjataan dan perlombaan senjata di seluruh Dunia akan mengakibatkan sebuah interaksi yang berlanjut kepada perlombaan senjata atau “arm race”. Apa yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia melalui Permenlu No 1 2017 ini merupakan salah satu persaingan dan penglihatan sejauh mana negara Indonesia berhasil menempatkan posisi alutsista yang digunakan. Di suatu sisi, hal ini merupakan hal yang positif karena dapat menunjukan persenjataan Indonesia di mata dunia, tetapi disisi yang lain ini juga merupakan sebuah “Agresivitas” apabila setiap negara menggunakan faktor kekuatan persenjataan yang dilakukan kepada misi

perdamaian dunia. Lain kata apabila Indonesia melakukan sebuah pengiriman alutsista yang akan ditunjukan untuk mengutamakan keamanan individual guna mencegah hal hal yang tidak diinginkan bagi kontingennya sendiri. Hal ini juga merupakan suatu yang pokok bagi negara negara untuk mengamankan pasukan yang bertugas di daerah perdamaian apalagi di daerah yang rawan dengan konflik yang tidak bisa diatur. Sebuah kasus menunjukan penyerangan kepada pasukan Misi Perdamaian PBB di daerah Kongo yang terjadi pada 8 Desember 2017, hal ini terjadi tetapi pelaku penyerangnya belum diketahui darimana itu berasal. Kejadian ini juga menewaskan 15 orang dan 50 lainnya terluka terjadi pada pasukan penjaga perdamaian yang berada di misi perdamaian PBB di Kongo. Dengan demikian penjagaan keamanan dari bidang safety equipment yang menunjang dibutuhkan didalam berbagai misi perdamaian PBB dimanapun. Diduga hal ini berasal dari grup ekstrimist yang berasal dari markas kecil di daerah Timur Afrika Tengah. Kejadian ini akan terus menimbulkan korban jiwa dari yang terluka tersebut. Sekjen UN Antonio Guterres menjelaskan bahwa penyerangan ini merupakan salah satu

kejadian terburuk di masa sejarah PBB, dan membuat pelaku sebagai tindakan penjahat perang.

Proyeksi dan peningkatan Alutsista TNI dibutuhkan guna mencapai ketahanan seperti teori Deterrence yang diungkapkan kepada Barry Buzan. Apa yang terjadi di kasus Misi Perdamaian PBB adalah peningkatan Alutsista terkadang tidak terlalu dibutuhkan didalam dunia internasional. Untuk mengirimkan alutsista yang bersifat major atau keras pun akan dianggap negatif oleh rakyat dan negara misi setempat. Hal ini karena diungkapkan didalam penjagaan pasukan perdamaian tidak dibutuhkan suatu hal yang bersifat paksaan dan memakai kekerasan serta force. Tetapi seperti yang diungkapkan PBB didalam *Uninformed Capability Requirements* lebih menegaskan adanya suatu tantangan multidimensional guna membangun kedamaian didalam negeri. Tetapi hal ini mengalami kelemahan, apabila suatu negara hanya ditugaskan untuk *peacebuilding* dan *major equipment* dikurangi, maka akan muncul konflik bersenjata yang meningkat. Faktor deterrent yang digunakan sebenarnya untuk menghalau pihak pihak yang bertikai. Sehingga akan terjadi suatu daya tangkal agar tidak menyerang pasukan

ini. Mengapa harus diberikan persenjataan, hal ini menjadi aneh karena penggunaan senjata malah dianggap lebih kasar. Tetapi dengan adanya senjata, tanggung jawab suatu negara kepada perajuritnya menjadi lebih baik.

### **Simpulan**

Indonesia memiliki kepentingan nasional yang begitu penting dalam pembukaan Undang Undang dasar 1945, salah satunya pengiriman Pasukan Garuda sebagai rangka dalam turut serta menjaga perdamaian dunia. Pengiriman pasukan Garuda yang dilakukan Indonesia memiliki citra yang positif di mata dunia, sehingga PBB mempercayakan misi misi yang sulit untuk diberikan ke Pasukan Garuda. Walaupun demikian, Indonesia telah memasang target untuk mencapai 4000 Peacekeeping pada tahun 2019. Hal ini tertuang didalam Permenlu no 1 tahun 2017. Diharapkan dengan adanya peraturan permenlu, setiap perangkat pemerintahan dapat mendukung Pengiriman Pasukan Garuda dan segala bentuk kelengkapannya sehingga menjadi pasukan yang siap di medan manapun yang ditugaskan. Hal ini bertujuan agar dengan kita mengirimkan Pasukan Perdamaian ke seluruh Dunia, diharapkan suatu bentuk soft diplomasi yang kita

lakukan akan dilihat oleh Internasional, sehingga Indonesia berpeluang untuk mencapai kepentingan nasional yaitu menjadi anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap pada tahun 2019. Dengan menjadi Anggota tidak tetap ini akan memperkuat diplomasi pertahanan yang diinginkan bagi Indonesia.

Teori dari Deterrence yang dijelaskan dari Profesor Barry Buzan menjelaskan bahwa adanya suatu peningkatan persenjataan penting untuk dilakukan kepada setiap negara. Pada hal ini Indonesia menjadi negara yang mendorong Peningkatan Alutsistanya agar menjadi sama dengan standarisasi dunia yang ditunjukan oleh PBB. Untuk itu Indonesia membutuhkan kembali sebuah kebijakan lebih yang mendukung peningkatan Alutsista ini guna memamerkan persenjataanya atau bahkan dapat meningkatkan industri Pertahanan Indonesia. Peningkatan Alutsista akan berkembang dan menjadi lebih baik lagi dengan banyaknya Pengiriman Pasukan Misi Garuda, karena bukan hanya meningkatkan diplomasi Pertahanan Indonesia melainkan juga untuk membuat persenjataan Indonesia lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman.

## Daftar Pustaka

- Agusalim, D. (2013). *Indonesia Dan Misi Perdamaian PBB: Tinjauan Diplomasi dan Politik Luar Negeri*. Yogyakarta: Institute Of International Studies UGM.
- Asianto, S. (2017). *Penjelasan Umum Mengenai Blue Print, Arah dan Strategi Dplomasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Jakarta: Proceeding Bank Indonesia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Indonesia: Rhinneka Cipta.
- Buzan, B. (1987). *An Introduction Strategic Studies Military Technology and International Relations*. London: The macmillan Press LTD.
- Blanchard; Lynda-Ann. (2009). *Ending War, Building Peace*. Sydney: Sydney University Press.
- Creswell. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach 3rd Edition*. USA: Sage Publications Inc.
- Danim, S. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Indonesia: Pustaka Setia.
- Diehl, Paul F. (2008). *Peace Operations*. Cambridge: Polity Press.
- Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Arizona: Sage Publications Inc.
- Kementerian Pertahanan RI, . (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indonesia.
- Simamora, P. (2013). *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simatupang, G. (2013). *Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan*. Quartedeck , 11.
- Slantchev, B. (2005). *Introduction to International Relations, Deterrence and Compellence*. 7.
- Steiner, B. (2004). *Diplomascy and International Theory*. Cambridge University Press , 493-509.
- Sugiyono, P. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryokusumo, S. (2004). *Praktik Diplomasi*. Jakarta: IBLAM.
- Yani, Y. M., Montratama, I., & Mahyudin, E. (2017). *Pengantar Studi Kemaaman*. Malang: Intrans Publishing.
- Yvonna S. Lincoln, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publications.
- Direktorat KIPS. (2016, Januari 20). kemlu.go.id. Diakses Agustus 17, 2017, from Kementerian Luar Negeri Indonesia: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Partisipasi-Indonesia-dalam-Pasukan-Misi-Perdamaian-PBB.aspx>
- Permenlu 1 No 2017; Perubahan Tentang Lampiran Permenlu 1 no 2015, Road Map Vision Pasukan Garuda 4000 Personil 2015-2019.